

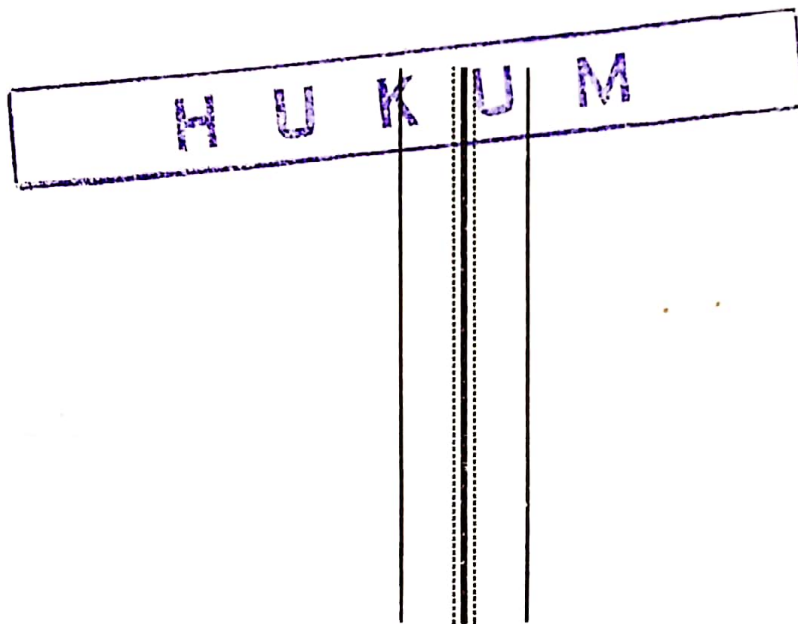


# **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**

**NOMOR : 3 TAHUN 1992**

## **TENTANG**

**PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA  
DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN**



## **BAGIAN HUKUM**

**SEKRETARIAT WILAYAH DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN**

**TAHUN 1991**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 5 TAHUN 1992 SERI D NO.SERI. 5

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR : 3 TAHUN 1992  
TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA DINAS  
LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH  
TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mewujudkan otonomi yang nyata dan bertanggung jawab dengan titik berat pada Daerah Tingkat II, diperlukan adanya pengelolaan potensi Daerah secara mantap dibidang lalu-lintas dan angkutan jalan pada Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- b. bahwa dalam rangka upaya meningkatkan pengembangan dan pengelolaan potensi Daerah sebagai salah satu usaha untuk kesejahteraan masyarakat dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, perlu diadakan pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja Dinas Lalu Lintas dan angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkannya dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1965 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Raya ;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Pemerintahan di Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian ;
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;
6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan ;
7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 1980 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dalam bidang Lalu Lintas dan angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah ;
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan dan Menteri Dalam Negeri KM 95 Tahun 1990 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

#### M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II HULU SUNGAI SELATAN.

#### B A B I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :  
a. Daerah : adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.



- b. Pemerintah Daerah : adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- c. Kepala Daerah : adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- d. Sekretaris Wilayah/ Daerah : adalah Sekretaris Wilayah/ Daerah-Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- e. Dinas : adalah Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- f. Kepala Dinas : adalah Kepala Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.
- g. Lalu Lintas : adalah pergerakan kendaraan, orang dan hewan di jalan.
- h. Angkutan : adalah sarana tertentu untuk pemindahan orang dan atau barang dari suatu tempat ketempat lain.
- i. J a l a n : adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun, meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas.
- j. Muatan Sumbu : adalah jumlah tekanan roda-roda dari suatu sumbu terhadap jalan.
- k. Kendaraan bermotor : adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan tenaga yang ada pada kendaraan itu dan biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan atau barang di jalan selain dari pada kendaraan yang berjalannya di atas rel.

1. Kendaraan tidak bermotor
- : adalah setiap kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan-itu termasuk kendaraan yang digerakkan tenaga penghela hewan dan dipergunakan untuk perlengkapan pengangkutan orang dan atau barang ;
- m. Mobil bis
- : adalah setiap kendaraan yang dilengkapi dengan lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun tanpa perlengkapan-pengangkutan barang ;
- n. Mobil penumpang
- : adalah setiap kendaraan yang dilengkapi semata-mata dengan-sebanyak-banyak 8 tempat duduk-tidak termasuk tempat duduk pengemudinya baik dengan maupun -tanpa perlengkapan bagasinya.
- o. Mobil barang
- : adalah setiap kendaraan bermotor selain mobil bis, mobil penumpang dan kendaraan roda dua yang dipergunakan untuk mengangkut -barang.
- p. Kendaraan Umum
- : adalah setiap kendaraan yang biasanya disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan pembayaran.
- q. Terminal
- : adalah prasarana untuk kepentingan angkutan jalan guna mengatur kedatangan, pemberangkatan dan -tempat berpangkal kendaraan umum serta tempat memuat dan menurunkan orang dan atau barang.
- r. Parkir
- : adalah tempat pemberhentian kendaraan bermotor dan kendaraan -tidak bermotor serta untuk tempat menurunkan dan menaikkan orang dan atau barang yg bersipat tidak segera.



- s. Tempat pemberhentian(halte) : adalah tempat memberhentikan dan tempat pemberhentian kendaraan-  
umum untuk menurunkan dan menaik-  
kan orang dan atau barang yang -  
bersipat segera.
- t. perusahaan bengkel : adalah suatu perusahaan yang me-  
nyelenggarakan pekerjaan perbaik-  
an, pembetulan, perawatan kenda-  
raan bermotor untuk umum dengan-  
suatu pembayaran.

## B A B II

### PEMBENTUKAN, KELUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

#### Bagian Pertama

##### Pembentukan

##### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Dinas Lalu Lintas -  
dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai  
Selatan.

#### Bagian Kedua

##### Keludukan

##### Pasal 3

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah dibi-  
dang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada-  
dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah, -  
sedangkan dalam bidang Administrasi dibawah koordinasi  
Sekretaris Wilayah/Daerah.

Bagian Ketiga  
Tugas Pokok  
Pasal 4

Dinas mempunyai tugas pokok :

- a. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga Daerah di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Melaksanakan tugas-tugas pembantuan dibidang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan dan tugas-tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah.

Bagian Keempat  
Fungsi  
Pasal 5

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Dinas mempunyai fungsi :

- a. Perencanaan yang merupakan segala usaha dan kegiatan pengumpulan data, pengelolaan data, penilaian dan penyusunan suatu rencana ;
- b. Pelaksanaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan dalam hal rekayasa Lalu Lintas dan manajemen Lalu Lintas Jalan Kabupaten dan manajemen Angkutan untuk jaringan trayek yang meliputi Daerah Tingkat II dan melaksanakan rencana yang telah ditetapkan ;
- c. Pembinaan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan penyuluhan, pengadaan dan penetapan tarif angkutan-orang dan barang, pemberian izin dan larangan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- d. Pengawasan, yang merupakan segala usaha dan kegiatan untuk melaksanakan pengawasan dan ketertiban untuk terlaksananya tugas pokok sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku ;



- e. Administrasi, yang merupakan segala usaha dan kegiatan di bidang ketatausahaan umum, Kepegawaian, Keuangan, Perlengkapan rumah tangga, Hukum dan Peraturan Perundang-undangan ;
- f. Koordinasi, yang merupakan segala usaha kegiatan untuk mengadakan hubungan dan kerja sama dengan Instansi lain daerah maupun vertikal guna kelancaran pelaksanaan tugas.

### BAB III

## ORGANISASI

### Bagian Pertama

#### Unsur-unsur Organisasi

#### Pasal 6

Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Unsur Pimpinan, yaitu Kepala Dinas ;
- b. Unsur Pembantu Pimpinan, yaitu Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Unsur Pelaksana, yaitu Seksi-seksi.

### Bagian Kedua

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 7

#### (1) Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas ;
- b. Sub Bagian Tata Usaha ;
- c. Seksi Angkutan, Terminal & Parkir dan Pembinaan Pengusahaan ;



- d. Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Rambu-rambu & Fasilitas Lalu Lintas ;
  - e. Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Penyuluhan.
- (2) Sub Bagian dan masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
- (3) Masing-masing urusan dan Sub Seksi dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung-jawab langsung kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1.

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 3

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan Tata Usaha Umum, Tata Usaha Kepegawaian, Tata Usaha Keuangan urusan rumah tangga dan Material dan Urusan Umum lainnya serta urusan Peraturan Perundang-undangan lainnya ;
- b. mengatur dan melaksanakan urusan rumah tangga Dinas ;
- c. mengatur dan melaksanakan Ketatausahaan Umum Dinas ;
- d. mengatur dan melaksanakan urusan umum, perlengkapan dan rumah tangga Dinas ;
- e. mengatur dan melaksanakan urusan Kepegawaian Dinas ;
- f. mengatur dan melaksanakan urusan Keuangan Dinas ;
- g. mengatur dan melaksanakan urusan Hukum/peraturan per Undang-undangan ;
- h. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lainnya ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 9

Sub Bagian Tata Usaha terdiri dari :

- a. Urusan Umum ;
- b. Urusan Kepegawaian ;
- c. Urusan Keuangan.

Pasal 10

(1) Urusan Umum mempunyai tugas :

- a. melaksanakan ketatausahaan Umum Dinas ;
- b. melaksanakan urusan Rumah Tangga Dinas ;
- c. melaksanakan urusan umum dan perlengkapan Dinas ;
- d. melaksanakan urusan-urusan Protokoler Dinas ;
- e. menghimpun, mengolah dan menganalisa data umum dan perlengkapan rumah tangga Dinas ;
- f. mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data pengembangan organisasi dan tatalaksana Dinas ;
- g. melaksanakan urusan hukum dan peraturan Perundang - undangan ;
- h. melaksanakan kerjasama dengan unit lainnya yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha.

(2) Urusan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan Kepegawaian dan ketatalaksanaan.

(3) Urusan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan-pengelolaan keuangan dan pembiayaan lainnya.



Paragraf 2

Seksi Angkutan, Terminal dan Parkir dan  
Pembinaan Pengusahaan

Pasal 11

Seksi Angkutan, Terminal dan Parkir dan Pembinaan  
Pengusahaan mempunyai tugas :

- a. mengatur dan melaksanakan kegiatan angkutan orang barang dan hewan ;
- b. mengatur dan melaksanakan pengendalian sistem angkutan orang, barang dan hewan ;
- c. mengatur dan mengendalikan terhadap kelancaran, keamanan dan ketertiban lokasi terminal ;
- d. mengatur dan mengendalikan kelancaran arus kendaraan keluar masuk terminal ;
- e. mengatur dan mengendalikan kegiatan dan perparkiran dalam kota ;
- f. mengatur dan mengendalikan pengelolaan terminal ;
- g. mengatur dan mengendalikan kelancaran, keamanan, - ketertiban lokasi parkir dalam kota ;
- h. mengatur dan mengendalikan sistem perparkiran dalam kota ;
- i. mengatur dan mengendalikan arus kendaraan masuk - dan keluar lokasi parkir dalam kota ;
- j. mengatur dan mengendalikan pengelolaan perparkiran dalam kota ;
- k. mengatur dan melaksanakan tertib perizinan ;
- l. mengatur dan melaksanakan tertib pemungutan pajak dan retribusi ;
- m. mempersiapkan bahan pedoman pemungutan pajak dan retribusi ;
- n. membuat pedoman pelaksanaan perizinan ;
- o. melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;

P. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas. : Pasal 12

Seksi Angkutan, Terminal dan Parkir dan Pembinaan Pengusahaan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Angkutan ;
- b. Sub Seksi Terminal dan Parkir ;
- c. Sub Seksi Pembinaan Pengusahaan.

Pasal 13

(1) Sub Seksi Angkutan mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan melaksanakan upaya keamanan dan ketertiban serta kelancaran angkutan orang, barang dan hewan ;
- b. Melaksanakan pemberian izin angkutan tetap dalam Daerah ;
- c. Mengatur dan melaksanakan pengendalian sistem angkutan orang, barang dan hewan ;
- d. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi izin angkutan orang, barang dan hewan dalam Daerah ;
- e. Melaksanakan, menyusun, mempersiapkan dan membuat pedoman pelaksanaan perizinan dan tarif angkutan orang, barang dan hewan dalam Daerah ;
- f. Melakukan kerja sama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan, Terminal dan Parkir dan Pembinaan Pengusahaan.

(2) Sub Seksi Terminal dan Parkir mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan terminal;
- b. Melaksanakan pengendalian Kelancaran arus kendaraan keluar masuk terminal ;



- c. Melaksanakan pemungutan Retribusi Terminal ; ;
- d. Melaksanakan pemungutan Retribusi parkir dalam Daerah ;
- e. Melaksanakan pengelolaan perparkiran dalam kota;
- f. Melaksanakan pengendalian kelancaran arus kendaraan keluar masuk lokasi parkir dalam kota ;
- g. Melaksanakan pengendalian kelancaran, keamanan dan Ketertiban terminal ;
- h. Membuat pedoman pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan keamanan ketertiban dan kelancaran arus kendaraan serta pemungutan retribusi terminal dan parkir ;
- i. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan, Terminal dan Parkir dan Pembinaan Pengusahaan.

(3) Sub Seksi Pembinaan Pengusahaan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha angkutan dan perusahaan perbengkelan umum dalam Daerah ;
- b. Melaksanakan pemberian izin pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dalam Daerah ;
- c. Melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi perizinan pendirian perusahaan bengkel umum kendaraan bermotor dalam Daerah ;
- d. Mempersiapkan dan menyusun pedoman pelaksanaan perizinan dan bimbingan teknis terhadap perusahaan angkutan dan perbengkelan umum dalam Daerah ;

- e. Melaksanakan pembinaan terhadap organisasi-organisasi pengusaha yang bergerak dibidang usaha dan perbengkelan umum dalam Daerah ;
- f. Memberikan bimbingan teknis dengan penyuluhan terhadap pelaksanaan usaha angkutan ;
- g. Melaksanakan pembinaan terhadap perusahaan bengkel umum dalam Daerah ;
- h. Memberikan bimbingan teknis dan penyuluhan terhadap perusahaan bengkel umum dalam Daerah ;
- i. Melaksanakan kerja sama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Angkutan, Terminal & Parkir dan Pembinaan Pengusahaan.

Paragraf 3

Seksi Keselamatan Lalu Lintas, Rambu-rambu dan Fasilitas Lalu Lintas.

Pasal 14

Seksi Keselamatan Lalu Lintas, rambu-rambu dan Fasilitas lalu lintas mempunyai tugas :

- a. Mengatur dan melaksanakan penetapan penggunaan dan larangan pada jalan Kabupaten dan Desa untuk semua kendaraan bermotor dalam Daerah ;
- b. Mengatur dan melaksanakan penetapan kecepatan maksimum untuk jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten dan Jalan Desa tertentu dalam Daerah ;
- c. Mengatur dan melaksanakan pengadaan, penempatan, pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu, tanda-tanda lalu lintas lainnya, serta fasilitas lalu lintas pada jalan Kabupaten dan jalan Desa dalam Daerah ;



- d. Mengatur dan melaksanakan pengendalian muatan kendaraan angkutan orang, barang dan hewan ;
- e. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan keselamatan lalu lintas, rambu-rambu, tanda-tanda lalu lintas lainnya, fasilitas lalu lintas dalam Daerah ;
- f. Melakukan kerja sama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 15

Seksi Keselamatan lalu lintas, Rambu-rambu dan Fasilitas lalu lintas terdiri dari :

- a. Sub Seksi Keselamatan lalu lintas ;
- b. Sub Seksi Rambu-rambu dan Fasilitas lalu lintas.

Pasal 16

- (1) Sub Seksi Keselamatan Lalu Lintas mempunyai tugas :
  - a. Melaksanakan penetapan penggunaan dan larangan pada jalan Kabupaten dan Desa bagi semua kendaraan bermotor dalam Daerah ;
  - b. Melaksanakan pengendalian dan pengaturan kecepatan maksimum bagi jenis kendaraan tertentu pada jalan Kabupaten dan jalan Desa tertentu dalam Daerah ;
  - c. Menyusun, mengolah dan menganalisa data tentang penggunaan jalan Kabupaten dan Desa dalam Daerah ;

- d. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan terhadap penggunaan serta larangan pada jalan Kabupaten dan Desa, pengendalian kecepatan maksimum kendaraan pada jalan Kabupaten dan Desa dalam Daerah ;
  - e. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Keselamatan Lalu Lintas, rambu rambu dan fasilitas lalu lintas.
- (2) Sub Seksi Rambu-Rambu dan Fasilitas Lalu Lintas mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengadaan, penempatan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu tanda lalu lintas lainnya dan fasilitas lalu lintas pada jalan Propinsi, Kabupaten dan Desa dalam Daerah ;
  - b. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan tempat-tempat penyeberangan jalan dalam Daerah ;
  - c. Penunjukan lokasi, pengelolaan dan pemeliharaan serta ketertiban tempat pemberhentian untuk menaikkan dan menurunkan penumpang ( halte ) dan pemberhentian untuk menurunkan penumpang tanpa menaikkan penumpang ( shelter) **Kendaraan umum** dalam Daerah ;
  - d. Menyusun, mengolah dan menganalisa data tentang data tentang rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya pada jalan Propinsi, Kabupaten dan Desa dalam Daerah ;
  - e. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan tentang pengadaan, penempatan pemasangan dan pemeliharaan rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;



- f. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja - lainnya yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan Fasilitas lalu lintas.

Paragraf 4

Seksi Perencanaan Pengendalian dan Penyuluhan

Pasal 17

Seksi Perencanaan pengendalian dan penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan, pengendalian dan penyuluhan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi perencanaan angkutan , terminal parkir, keselamatan lalu lintas , rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dalam rangka penyusunan rencana dan program serta pengendalian dibidang lalu lintas dan angkutan jalan dalam Daerah ;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dalam Daerah ;
- d. Menyusun dan melaksanakan program kerja penyuluhan dalam rangka pengendalian lalu lintas dan angkutan jalan dalam Daerah ;
- e. Menerima, menyusun dan menyampaikan laporan kegiatan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan ;

- f. Membuat pedoman pelaksanaan penyusunan perencanaan, pengendalian, penyuluhan lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
- g. Menyusun dan melaksanakan program kerja penyuluhan dalam rangka pengendalian lalu lintas dan Angkutan Jalan ;
- h. Melaksanakan kerjasama dengan unit kerja lain - yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan - oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Seksi Perencanaan, Pengendalian dan Penyuluhan terdiri dari :

- a. Sub Seksi Perencanaan ;
- b. Sub Seksi Pengendalian ;
- c. Sub Seksi Penyuluhan.

Pasal 19

(1) Sub Seksi Perencanaan mempunyai tugas :

- a. Menyusun perencanaan dibidang lalu lintas dan angkutan jalan meliputi perencanaan angkutan, terminal, parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;
- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data perencanaan dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;
- c. Melaksanakan program kegiatan dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;



- d. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokoknya ;
- e. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi Perencanaan, pengendalian dan penyuluhan.

(2) Sub Seksi Pengendalian mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan pengendalian dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;
- b. Melaksanakan pengendalian dalam hal pemungutan-pajak retribusi izin angkutan orang, barang dan hewan, retribusi terminal dan parkir serta pemungutan pajak dan retribusi perizinan pendirian perusahaan bengkel umum dalam Daerah.
- c. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data kegiatan pengendalian dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah;
- d. Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan rekayasa dan manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dalam Daerah ;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi perencanaan, pengendalian dan penyuluhan.

(3) Sub Seksi Penyuluhan mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan kegiatan penyuluhan dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;

- b. Mengumpulkan, mengolah dan menganalisa data dibidang penyuluhan dalam Daerah ;
- c. Melaksanakan pembuatan laporan dinas dibidang angkutan, terminal dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lalu lintas lainnya dalam Daerah ;
- d. Menyusun dan membuat pedoman pelaksanaan penyuluhan dibidang angkutan, terminal, dan parkir, keselamatan lalu lintas, rambu-rambu dan fasilitas lainnya dalam Daerah ;
- e. Melakukan kerjasama dengan unit kerja lain yang berhubungan dengan tugas pokok ;
- f. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Seksi perencanaan, pengendalian dan penyuluhan.

#### Pasal 20

Perubahan susunan organisasi yang meliputi pengembangan dan pengurangan satuan organisasi pada Dinas akan diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

B A B IV

TATA KERJA

#### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala-Kepala Seksi, Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Seksi pada Dinas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi.



Pasal 22

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 23

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan dinas wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 25

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyampaian laporan lebih lanjut kepada atasan yang lebih tinggi.

Pasal 26

Masing-masing Kepala Seksi pada Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Kepala Dinas melalui Kepala Sub Bagian Tata Usaha yang menampung semua laporan serta menerbitkannya sebagai laporan berkala Dinas.

Pasal 27

Kepala Dinas dalam menyampaikan laporan atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja dibidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugasnya, pimpinan satuan organisasi pada Dinas lalu lintas dan angkutan jalan wajib mengadakan rapat berkala.

B A B V

K E P E G A W A I A N

Pasal 29

- (1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala-Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan atas usul Kepala Daerah.
- (3) Kepala-Kepala Urusan dan Kepala-Kepala Sub Seksi pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah atas usul Kepala Dinas.

B A B VI

P E M B I A Y A A N

Pasal 30

Sumber pembiayaan Dinas disediakan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan serta sumber-sumber pendapatan lainnya yang sah.

B A B VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

- (1) Segala ketentuan yang berhubungan dengan urusan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang sudah ada masih tetap berlaku sampai dengan diaturnya ketentuan baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.



- (2) Pelaksanaan urusan sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini yang dilaksanakan oleh Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan dialihkan menjadi tugas Dinas.

B A B VIII  
P E N U T U P  
Pasal 32

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Keputusan Kepala Daerah.
- (2) Segala sesuatu yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan, dan agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tk.II  
Hulu Sungai Selatan  
Ketua,

Kandangan, 10 Maret 1992.  
Bupati Kepala Daerah TK.II  
Hulu Sungai Selatan,

Cap. dtt.

Cap. dtt.

M. YUSERAN ANWAR, BA.

H. MOH. ARIAN, SH.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah TK.II Hulu Sungai Selatan. Nomor : 5  
Pada tanggal : 18 April 1992  
Tahun : 1992  
Seri : D  
Nomor Seri : 5

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan dengan Keputusan : Nomor : 03/SK-1/Kum Tahun : 1992  
Tanggal : 8 April 1992

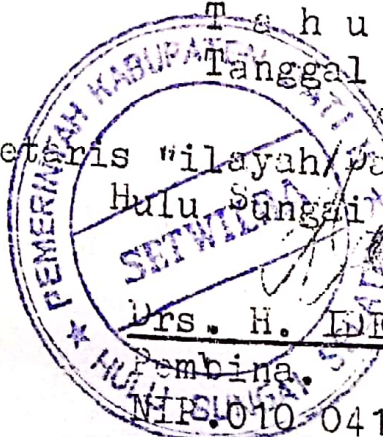
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,

Drs. H. LERIS APSANI.

Pembina.

NIP. 010 041 008.

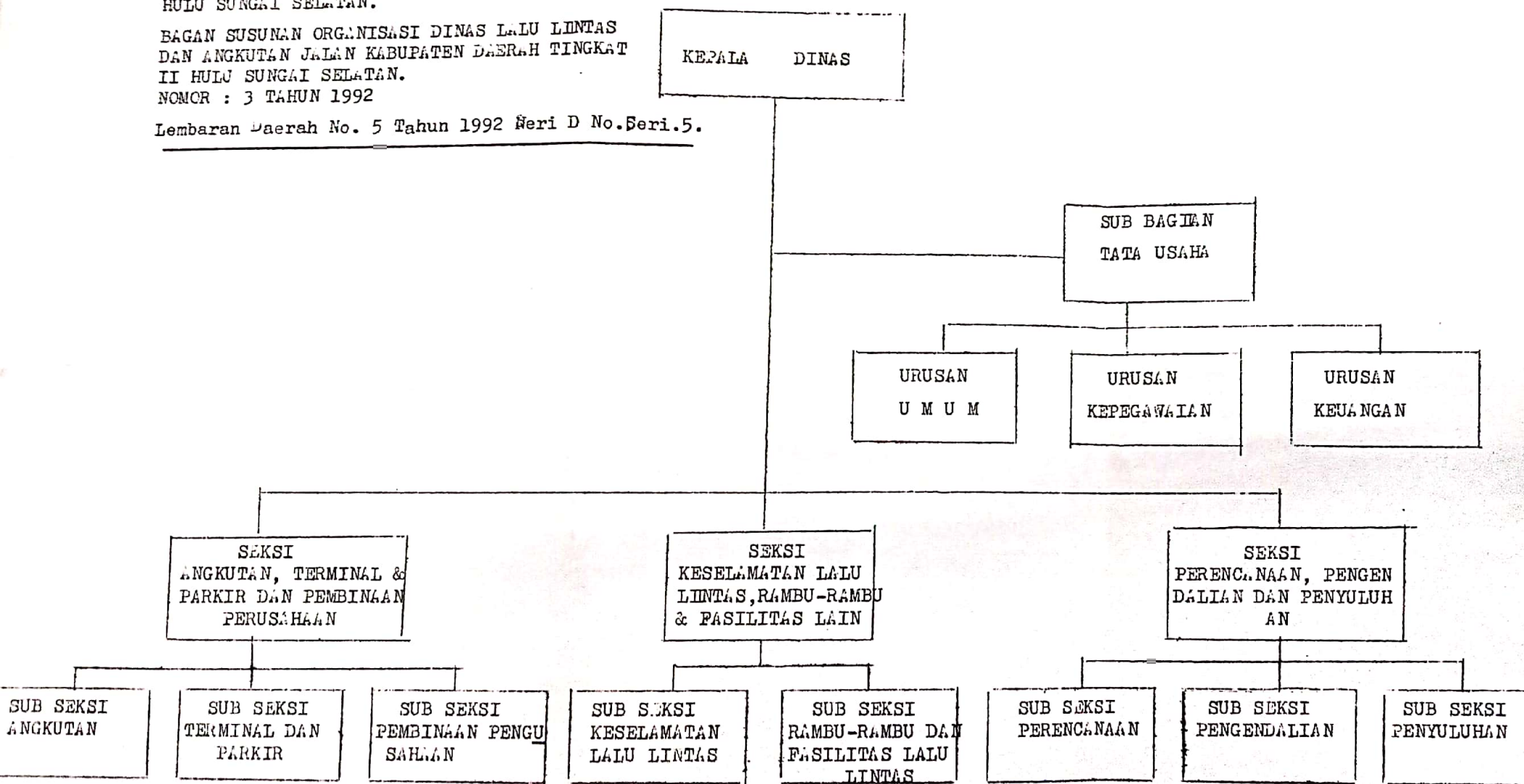
Salinan sesuai dengan Aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
HULU SUNGAI SELATAN.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS LALU LINTAS  
DAN ANGKUTAN JALAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT  
II HULU SUNGAI SELATAN.  
NOMOR : 3 TAHUN 1992

Lembaran Daerah No. 5 Tahun 1992 Seri D No. Seri.5.



Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten  
Daerah Tingkat II Hulu Sungai Selatan,  
Ketua,

cap. dtg.  
M. YUSERAN ANWAR, Ba.

Bupati Kepala Daerah Tingkat II  
Hulu Sungai Selatan,

cap. dtg.  
H. MOH. ARLIN, SH.